



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 438 TELP/FAX (0761)855734 PEKANBARU 28282



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 438, Telepon/Fax. (0761)855734
E-mail : bpbd_riau@yahoo.co.id, Website : www.bpbd.riau.go.id

PEKANBARU

Kode Pos 28282

**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor:Kpts. 15 /BPBD/I/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP) TAHUN 2022
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

- Menimbang:
- Bahwa untuk akuntabilitas kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
 - Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 80);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);
11. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir pada lampiran yang Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki tugas menyusun draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 untuk diajukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Ex. Officio Kepala BPBD Provinsi Riau (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KALAKSA BPBD PROV RIAU
NOMOR : Kpts.15/BPBD/1/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	M. EDY AFRIZAL, SE, MH	Kepala Pelaksana	Penanggung Jawab	
2.	MAILIRIANDI S, S.STP, M.Si	Sekretaris	Ketua	
3.	ROY SANDER.S, S.STP., M.Si	Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris	
4.	Drs. EKO RAHDIPPA, M.M	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	
5.	JIM GAFUR , A.P., M.Si	Kebid Kedaruratan	Anggota	
6	Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	Anggota	
7.	AHYU SUHENDRA, S.E	Kabid Data dan Informasi Kebencanaan	Anggota	
8.	NANDA IHSANUL R, S.STP., M.Si	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota	
9.	DESRIZAL, Bac	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
10.	YOPAN SAMSUL CHOERU Z, ST	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota	
11.	AFRINA SYOFYAN, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota	
12.	SRILINDAWATI, S.Si, M.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
13.	AZWAN, M.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
14.	ANDIKA ADIPURUSA	Pengadministrasi Perencanaan Program	Anggota	
15.	JONI MARIANDI, SH	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Anggota	

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**



M. EDY AFRIZAL, SE, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730421 199203 1 002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dan disesuaikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 masih terdapat kekurangan, maka diharapkan masukan positif dalam penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 agar lebih baik untuk mewujudkan Riau tangguh dalam menghadapi bencana. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Tahun 2022, semoga bermanfaat dalam kemajuan pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau agar semakin tangguh dalam menghadapi bencana.

Pekanbaru, Maret 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730421 199203 1 002



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau	2
1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau.....	3
1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau	7
1.5 Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	21
2.1.1 Visi dan Misi	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Riau.....	26
2.2. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2022	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 ..	37
3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu.....	38
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra BPBD Provinsi Riau	38
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	39
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah dilakukan	40



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

3.1.5.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
3.2 Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	47
LAMPIRAN	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.4.2 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji	9
Tabel 1.4.3 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1.4.4 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jenjang Fungsional Tertentu.....	11
Tabel 1.4.5 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	12
Tabel 1.4.6 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perjenjangan	13
Tabel 1.4.7 Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBD Provinsi Riau.....	15
Tabel 2.1.2.a Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD.....	27
Tabel 2.1.2.b RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024	28
Tabel 2.2.1 Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
Tabel 2.2.2 Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022.....	32
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	36
Tabel 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	37
Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra BPBD Provinsi Riau	38
Tabel 3.1.5 Sasaran dan Indikator Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pada capaian target Tahun 2022	40
Tabel 3.1.5.1 Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya	42
Tabel 3.1.6 Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
Tabel 3.1.6.a Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	43
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	2
Gambar 1.4.1 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.4.3 Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Tahun 2022	11
Gambar 1.4.4 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan	12
Gambar 1.4.5 Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional	13
Gambar 1.4.6 Tingkat Pendidikan Perjenjangan Pegawai Negeri Sipil BPBD Provinsi Riau	14
Gambar 3.1.1 Foto Kegiatan Rapat Evaluasi BPBD Provinsi Riau	34
Gambar 3.1.2 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau	37
Gambar 3.1.3 Gubri Menyerahkan Penghargaan Sebagai OPD dengan Inovasi Terbaik Kepada Kalaksa BPBD Provinsi Riau	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Oleh karena itu melalui penyusunan LKjIP BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan dapat :

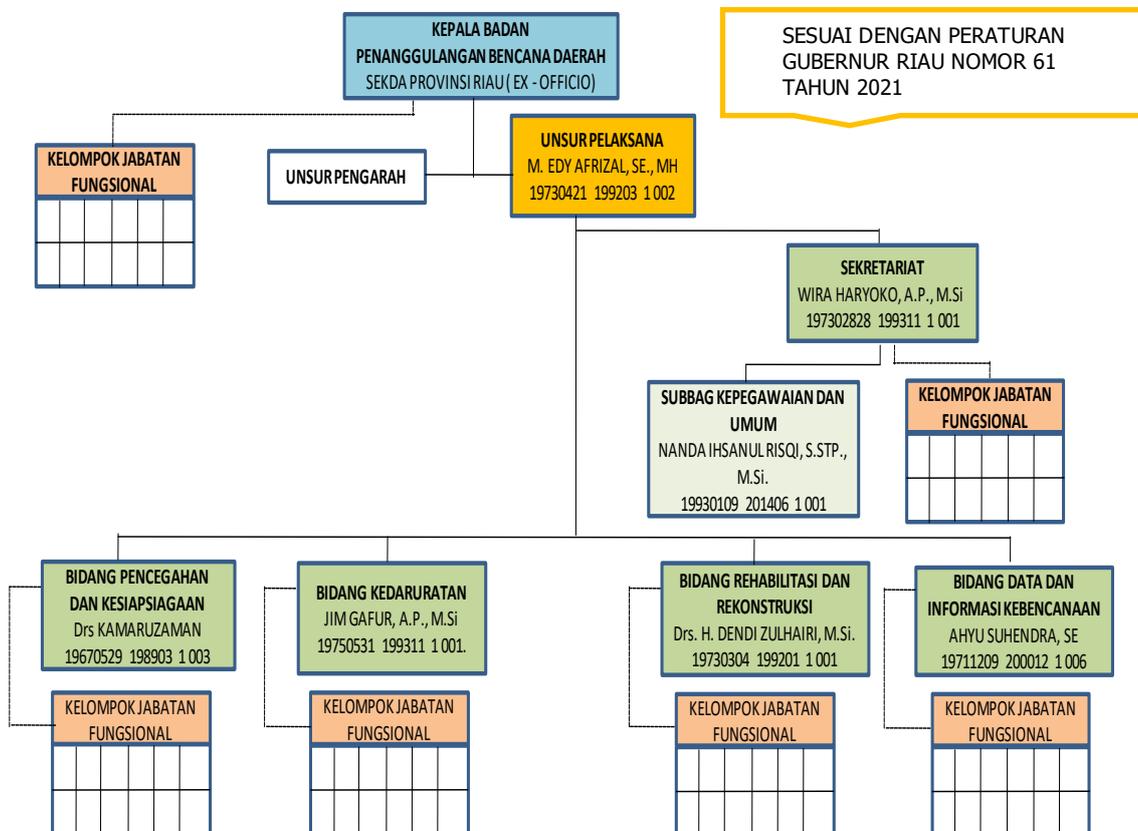
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD Provinsi Riau;
2. Mendorong BPBD Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BPBD Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau, berikut adalah gambaran umum BPBD Provinsi Riau dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya modal.

1.2 Struktur Organisasi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU



SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2021

1.3 Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Riau

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II a)
3. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
4. Kepala Subbagian merupakan Jabatan pengawas

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membawahi:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian, membawahi :
 - 1.1 Sub Bagian Perencanaan Program, yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - 1.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan

serta menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran ;

1.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

1.4 Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari kelompok Jabatan fungsional perencana dan kelompok jabatan Fungsional Arsiparis yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya masing- masing.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana, terdiri atas :

2.1 Sub Bidang Pencegahan dengan uraian tugas pengumpulan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, fasilitas dalam upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

2.2 Sub Bidang kesiapsiagaan dengan uraian tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.

- 2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Bidang kedaruratan yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat, terdiri atas :
 - 3.1 Sub Bidang penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana; dan
 - 3.2 Sub Bidang distribusi dan logistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.
 - 3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana, terdiri atas
 - 4.1 Sub Bidang Rehabilitasi dengan uraian tugas yakni menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama

- perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban; dan
- 4.2 Sub Bidang Rekonstruksi dengan uraian tugas yakni menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Bidang Data dan Informasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan dan Subbidang Sistem Informasi, terdiri atas :
- 5.1 Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data spasial dan statistik serta pengembangan metode dan standar pengelolaan basis data penanggulangan bencana; dan
 - 5.2 Sub Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi bencana serta pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiap siagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah pada unsur pengarah, unsur pelaksana, sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis BPBD Provinsi Riau

1.4.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah pegawai pada Badan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 64 orang. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau:

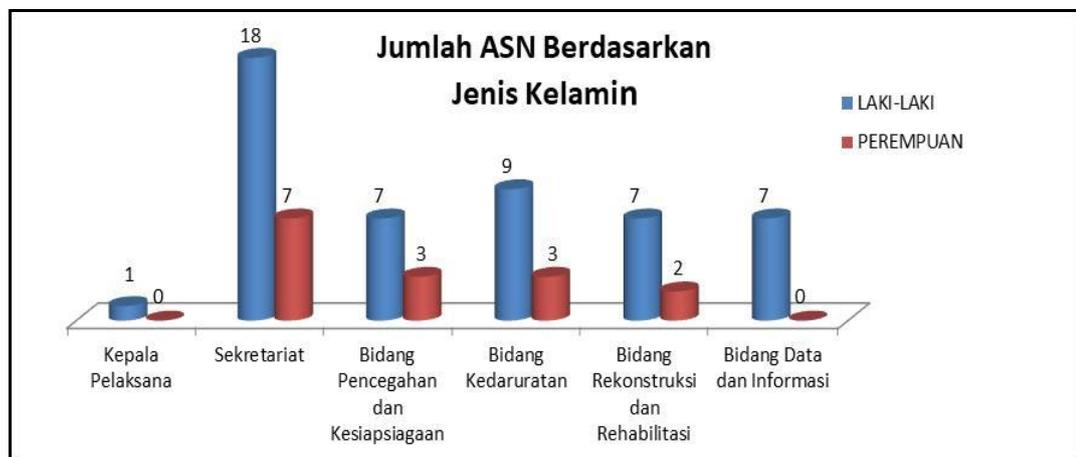
1. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Perkembangan jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau adalah sebanyak 64 orang. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.4.1 dan gambar 1.4.1 berikut ini.

**Tabel 1.4.1
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Unit	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1	0	1
2	Sekretariat	18	7	25
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	7	3	10
4	Bidang Kedaruratan	9	3	12
5	Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	7	2	9
6	Bidang Data dan Informasi	7	0	7
JUMLAH		49	15	64
PERSENTASE		76,56	23,44	100,00

Sumber Data : Desember 2022



**Gambar 1.4.1
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin**

BPBD Provinsi Riau Tahun 2022

Jika melihat pada jenis kelamin aparatur BPBD Provinsi Riau, secara total berjumlah 64 orang dengan komposisi pegawai laki-laki sebanyak 49 Orang dan pegawai wanita sebanyak 15 Orang.

2. Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Gaji.

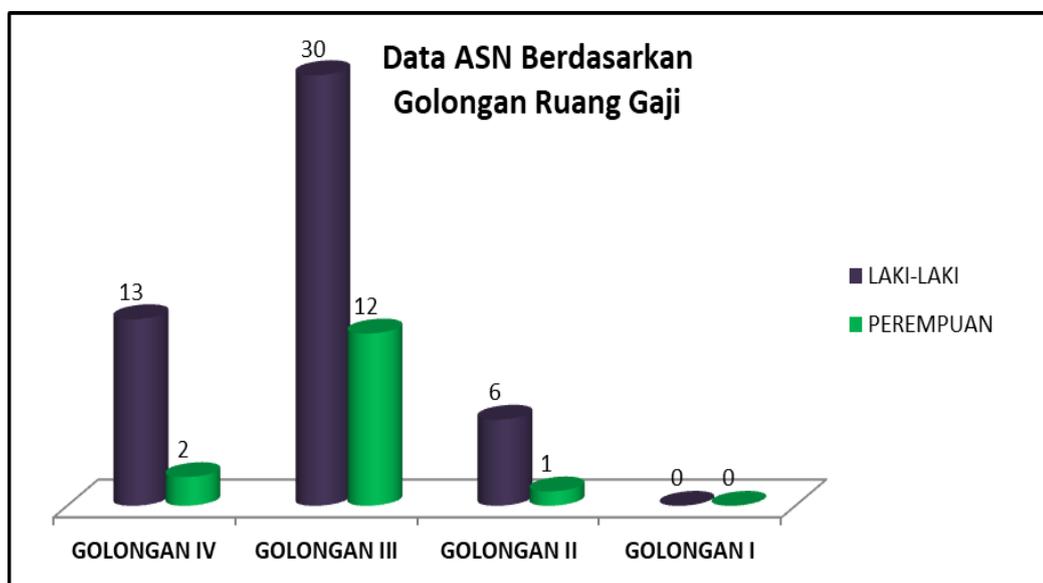
Tabel 1.4.2
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji

No.	GOLONGAN RUANG GAJI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	GOLONGAN IV	13	2	15	23,44
2	GOLONGAN III	30	12	42	65,63
3	GOLONGAN II	6	1	7	10,94
4	GOLONGAN I	0	0	0	0,00
JUMLAH		49	15	64	100,00

Sumber Data : Desember 2022

Jika melihat pada tingkat Golongan Ruang Gaji aparatur BPBD Provinsi Riau, secara total berjumlah 64 orang dengan komposisi pegawai terbanyak pada Golongan III sebanyak 42 Orang atau 65,63%, Sedang Golongan Ruang Gaji terkecil adalah Golongan II berjumlah 7 orang atau sekitar 10,94%.

Sedangkan bila diklasifikasikan Berdasarkan Golongan Ruang Gaji, maka sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4.2. pegawai BPBD Provinsi Riau dengan diagram tertinggi berada pada ruang gaji golongan III, dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.4.2
Keadaan Golongan Ruang Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)
BPBD Provinsi Riau Tahun 2022

3. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau berjumlah 64 orang, berdasarkan Jabatan terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok sebagaimana data pada Tabel 1.4.3 berikut ini :

Tabel 1.4.3
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN / ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	ESELON II	1	0	1	1,56
2	ESELON III	5	0	5	7,81
3	ESELON IV	1	0	1	1,56
4	FUNGSIONAL MADYA	1	1	2	3,13
5	FUNGSIONAL MUDA	13	4	17	26,56
6	FUNGSIONAL PERTAMA	6	1	7	10,94
7	STAFF/NON STRUKTURAL	23	8	31	48,44
JUMLAH		50	14	64	100,00

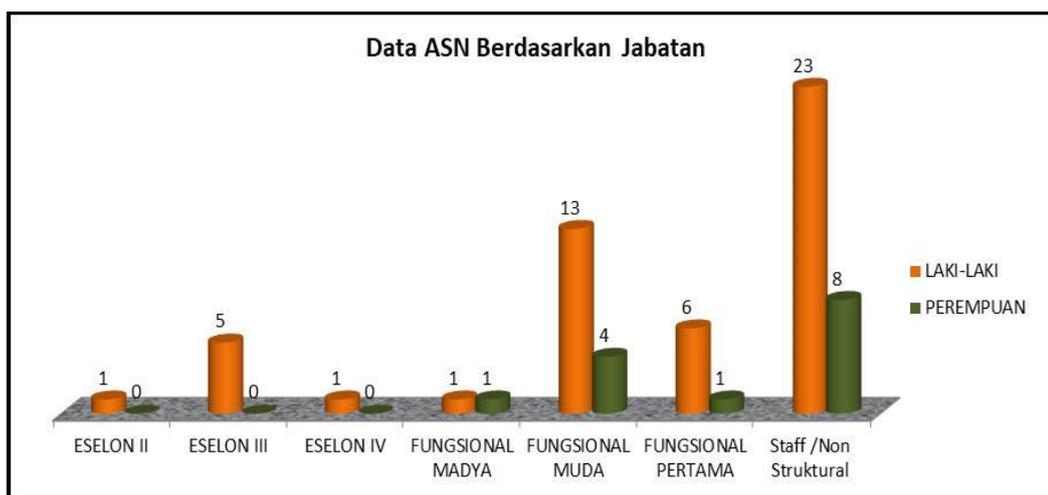
Sumber Data : Desember 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Berdasarkan dengan jumlah jabatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Riau Dari 64 pegawai BPBD Provinsi Riau, terdapat sebanyak 26,56 % dengan jabatan fungsional Muda yang merupakan pegawai terbanyak yakni sebanyak 17 pegawai. Hal ini sesuai dengan ruang peta jabatan yang ada pada BPBD Provinsi Riau.

Hingga revisi Renstra BPBD Provinsi Riau tahun 2019–2024, kondisi pejabat Eselon Pada BPBD Provinsi Riau telah terpenuhi dan tidak terdapat kekosongan jabatan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.4.3 di atas.

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat pada Gambar 1.4.3 berikut :



Gambar 1.4.3
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

BPBD Provinsi Riau telah memiliki 26 Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu dengan jumlah jabatan Fungsional tertinggi yakni jabatan fungsional Penata Kebencanaan sebanyak 11 Orang dengan persentase 42,31 % untuk rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

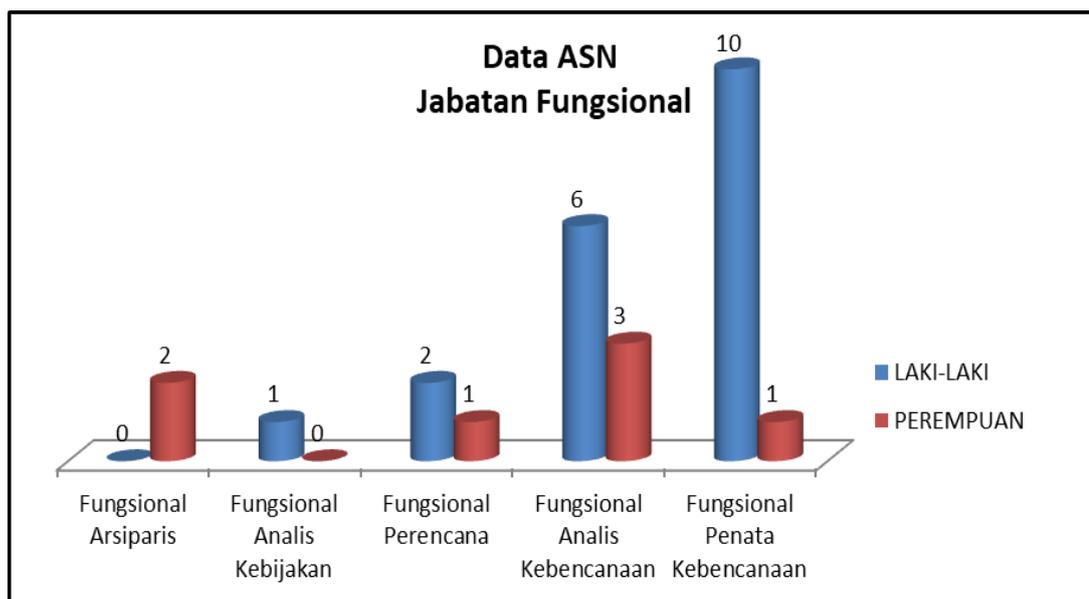
Tabel 1.4.4
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Fungsional Arsiparis	0	2	2	7,69
2	Fungsional Analisis Kebijakan	1	0	1	3,85
3	Fungsional Perencana	2	1	3	11,54
4	Fungsional Analisis Kebencanaan	6	3	9	34,62
5	Fungsional Penata Kebencanaan	10	1	11	42,31
JUMLAH		19	7	26	100,00

Sumber Data : Desember 2022

Berikut gambar yang 1.4.4 yang memperlihatkan diagram tertinggi dan terendah berdasarkan Jabatan Fungsional yang ada pada BPBD Provinsi Riau :



Gambar 1.4.4
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan Fungsional

4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

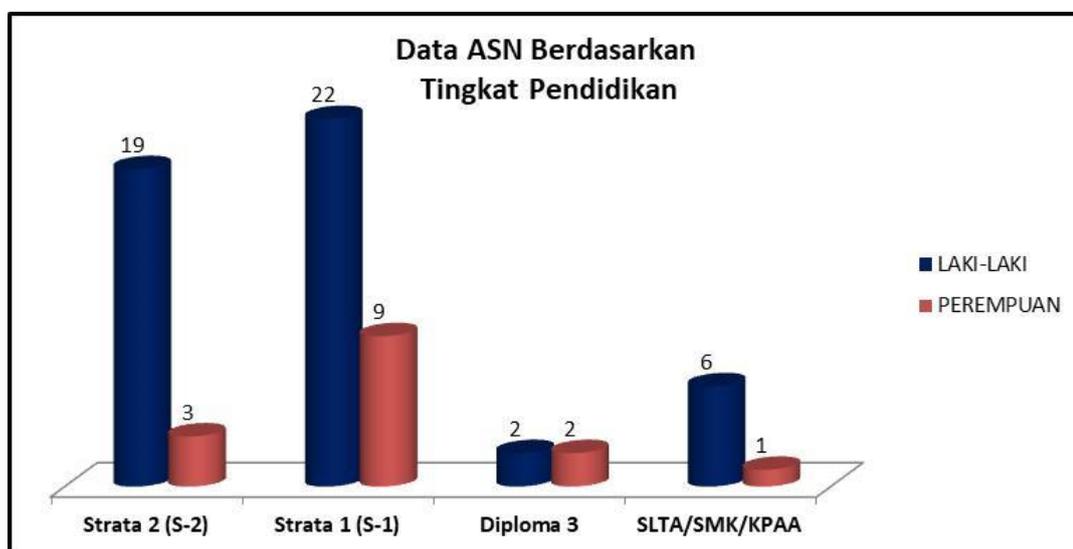
Dari data pada Tabel 1.4.5 diketahui bahwa pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPBD Provinsi Riau didominasi oleh tingkatan Strata I (S.1) yang berjumlah 31 orang atau 48,44%.

Tabel 1.4.5
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Strata 2 (S-2)	19	3	22	34,38
2	Strata 1 (S-1)	22	9	31	48,44
3	Diploma 3	2	2	4	6,25
4	SLTA/SMK/KPAA	6	1	7	10,94
5	SLTP	0	0	0	0,00
JUMLAH		49	15	64	100,00

Sumber Data : Desember 2022

Secara umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau cukup Baik, dimana dari 64 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 7 Orang atau 10,94% untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan SLTA/SMK yang merupakan jejang pendidikan terendah dan persentase terkecil di BPBD Provinsi Riau. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.4.5
Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau
menurut Tingkat Pendidikan Formal

5. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penjenjangan

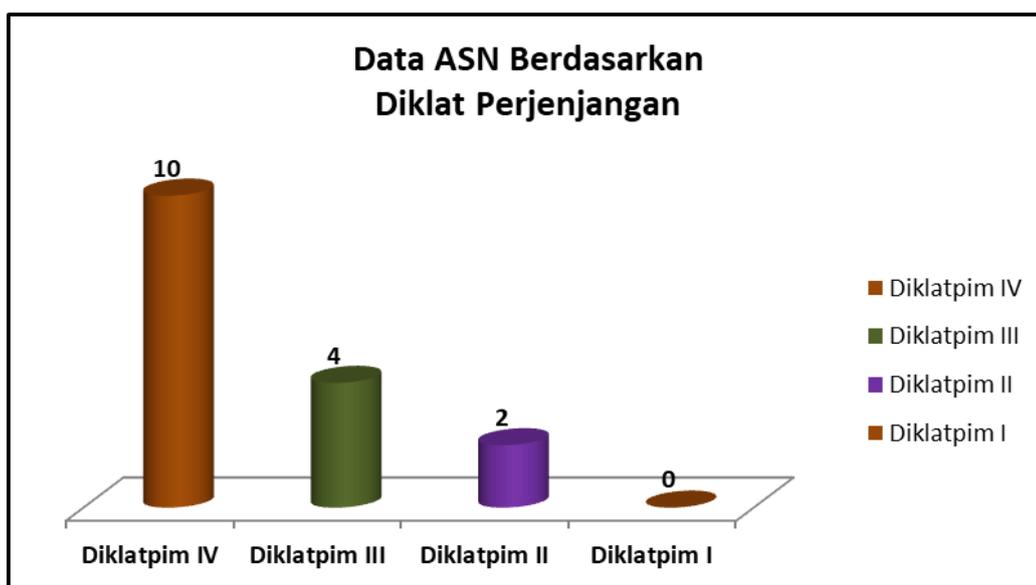
Data pada Tabel 1.4.6 Mengambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan penjurangan berjumlah 16 orang.

Tabel 1.4.6
Data Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Penjurangan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Diklatpim IV	10
3	Diklatpim III	4
4	Diklatpim II	2
5	Diklatpim I	0
JUMLAH		16

Sumber Data : Desember 2022

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan perjenjangan terdapat 19 orang ASN yang telah mengikuti diklatpim IV, 7 Orang ASN telah mengikuti diklatpim III dan 1 Orang ASN yang telah mengikuti diklatpim II yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.4.6
Tingkat Pendidikan Perjenjangan Pegawai Negeri Sipil
Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Riau Tahun 2022

6. Fasilitas Penunjang (Perlengkapan Kantor)

Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau memiliki 1 (satu) Gedung yang terdiri 3 (tiga) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC) dan didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, serta jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global. Selanjutnya beberapa perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan program bidang kedaruratan kebencanaan. Adapun fasilitas penunjang BPBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4.7
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) BPBD Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah (dalam Bidang/unit/buah/set)
1	Tanah	2
	Tanah	2
	Tanah Persil	2
2	Peralatan dan Mesin	2600
	Alat-Alat Besar	715
	Alat-Alat Besar Darat	60
	Alat-Alat Besar Apung	0
	Alat-Alat Bantu	655
	Alat-Alat Angkutan	96
	Alat Angkutan Darat Bermotor	28
	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3
	Alat Angkut Apung Bermotor	22
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	43
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82
	Alat Bengkel Bermesin	22
	Alat Bengkel Tak Bermesin	50
	Alat Ukur	10
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	881
	Alat Kantor	86
	Alat Rumah Tangga	578

	Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	217
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	214
	Alat Studio	67
	Alat Komunikasi	134
	Peralatan Pemancar	13
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	158
	Alat Kedokteran	158
6	Alat Persenjataan	276
	Persenjataan Non Senjata Api	276
7	Alat Khusus Kepolisian	
	Komputer	178
	Komputer Unit	88
	Peralatan Komputer	90
8	Gedung dan Bangunan	3
	Bangunan Gedung	3
	Bangunan Tempat Kerja	1
	Bangunan Gudang	2
9	Aset Tetap Lainnya	254
	Bahan Perpustakaan	252
	Buku dan Perpustakaan	252
	Barang Bercorak	
10	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1
	Barang Bercorak Kesenian	1
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
	Aset Tetap Dalam Renovasi	1
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2

Sumber Data : Desember 2022

1.5. Permasalahan Utama Penanggulangan Bencana Provinsi Riau

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat", akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007. Apabila diterapkan ke dalam

daur program kerja, maka program dan kegiatan penanggulangan bencana merupakan siklus sistemik kegiatan.

Secara umum kegiatan itu menyangkut Data dan Informasi Kebencanaan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang konsisten dan berkesinambungan untuk pemenuhan SPM sub urusan kebencanaan dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai ketentuan umum dan tahapan didalam penanggulangan bencana, sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari gambaran diatas, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Luasnya cakupan wilayah yang dilakukan penanggulangan bencana dengan potensi bencana yang beragam.
- 2) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain.
- 3) Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 4) Degradasi lingkungan akibat pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Peluang

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 3 (tiga) Fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando, Fungsi Pelaksana ketiga fungsi ini memberikan kekuatan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.

Ketiga Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mampu diimplementasikan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari operasional Satuan Tugas Pos Komando Utama Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau yang mampu mengintegrasikan personil dari background yang berbeda dalam satu kesatuan Pos Komando Utama.

Dukungan Peralatan berupa Helicopter dan Pesawat Teknologi Modifikasi Cuaca serta Dana Siap Pakai (DSP) kepada BPBD Provinsi Riau dalam melakukan tugas penanggulangan bencana di Provinsi Riau menjadi peluang yang harus dioptimalkan pelaksanaannya. Inventarisasi keterlibatan swasta/dunia usaha dalam kewajiban CSR nya agar dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

Demikian juga dari pihak legislatif yang sudah beberapa kesempatan diikutsertakan dalam tugas penanggulangan bencana sehingga membuka cakrawala pemikiran semua pihak bahwa keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sangat penting dan strategis, ketika situasi genting dan darurat keberadaan lembaga ini menjadi tumpuan dan harapan semua orang untuk berkoordinasi dengan Gubernur, Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD,

Kepala Bappeda dan DPRD agar dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius terkait penguatan anggaran yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau walaupun masih jauh dari usulan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana.

Untuk menyikapi peluang ini agar penggunaan anggaran bisa digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu dipersiapkan Rencana Strategis yang komprehensif, terukur dan mengakomodir semua persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Selain itu keberadaan Bidang Data dan Informasi dapat menjadi jembatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam berkoordinasi untuk Provinsi Riau yang tangguh dalam menanggulangi bencana.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa peluang yang dapat dijadikan dalam analisa SWOT :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.
3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tersedianya Belanja Tak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan jika status siaga darurat bencana telah ditetapkan, agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah, dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dengan melihat tantangan dan peluang yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang akan menjadi dasar dalam

penentuan strategi kebijakan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Riau dapat dikelompokkan ke dalam beberapa masalah pokok sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana.	Setiap tahunnya hanya dapat melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana sebanyak 50 orang sampai dengan 60 orang relawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat tentang penetapan anggaran kebencanaan di daerah dari besaran APBD nya. 2. Pemerataan pelatihan untuk relawan di tiap-tiap Kabupaten/Kota Provinsi Riau 3. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Belum tersedianya data relawan yang sudah mendapatkan pelatihan
2.	Diperlukannya Sarana dan Prasarana pendukung penanggulangan bencana.	Sarana dan Prasarana masih belum representatif seperti Pusdatin dan peralatan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pagu anggaran dalam pembelian peralatan. 2. Penggunaan peralatan dilapangan dapat memperpendek massa umur peralatan. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan sistim informasi penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana dan mengurangi dampak yang terjadi dengan semangat *zero accident*.

2. Pembinaan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan lembaga yang diamanatkan dalam hal penyampaian data dan informasi kebencanaan sesuai amanat SPM tentang pelayanan informasi Rawan Bencana yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Seharusnya sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan untuk mengembalikan pulihnya aktivitas masyarakat seperti seharusnya.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta penguatan kapasitas aparatur

tanggap darurat bencana. Untuk itu perlu adanya pelatihan bagi aparaturnya dalam mengupdate ketrampilannya.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana. Inventarisasi terkait dana CSR dunia usaha juga perlu dilakukan agar kewajiban dunia usaha tersebut dapat diarahkan untuk penanggulangan bencana di Provinsi Riau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik secara internal ataupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada.

2. 1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dibuat dengan acuan kepada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Acuan ini merupakan landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi yang dipayungi dalam visi dan misi BPBD Provinsi Riau. adapun Visi dan misi BPBD Provinsi Riau sebagai berikut :

2. 1.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 yang tercantum dalam RPJMD adalah :

**“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,
Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:

Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) – Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar – Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> – Mengurangi ketimpangan sosial – Menanggulangi kemiskinan – Menurunkan tingkat pengangguran
Bermartabat	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kehidupan beragama – Melestarikan adat istiadat – Mengembangkan nilai sosial dan budaya
Unggul	<ul style="list-style-type: none"> – Prestasi di bidang seni, budaya dan agama – Prestasi di bidang olahraga – Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan – Terobosan dan inovasi daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan itu, dalam mewujudkan visi Provinsi Riau 2019-2024 maka misi pembangunan jangka menengah, meliputi:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Misi 2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Misi 4: Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, dalam rangka mendukung visi misi tersebut BPBD Provinsi berkontribusi dengan mendukung misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Seperti diketahui, dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga. Dengan demikian BPBD sudah ikut mendukung tercapainya misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Riau.

Seperti diketahui, Visi Pemerintah Provinsi Riau adalah; ***"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja"***. sedang Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah; *"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana"*, maka dengan semangat dan alasan filosofis itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau merumuskan Visi:

"Terwujudnya Ketangguhan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Bencana"

Dengan slogan *Riau Bebas Asap* bermaksud merubah paradigma bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, penanganan bencana banjir, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat Riau, bahkan masyarakat negara tetangga.

2. 1.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Riau

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Provinsi Riau, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan yaitu Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2022 adalah terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Riau, dimana definisi penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah terdiri dari :

- 1) Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB).
- 2) Penanganan kedaruratan bencana.
- 3) Pemulihan pasca bencana

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.1.2.a berikut ini :

**Tabel 2.1.2.a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Provinsi Riau**

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Riau Tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuat kebijakan dan kelembagaan. 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik. 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. 6. Perkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP capaian SPM Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. 2. Pembentukan Desa Tangguh Bencana. 3. Pembentukan Forum PRB di berbagai wilayah (Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi). 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan. 5. Sosialisasi pemasangan Early Warning System. 6. Mengoptimalkan PUSDALOPS dan PUSDATIN di Provinsi, Kabupaten/Kota 7. Mengaktifkan Tim Reaksi Cepat dalam rangka dukungan ke Kabupaten/Kota 8. Menyediakan logistik dan peralatan dalam rangka penanganan darurat bencana. 9. Melatih lebih banyak SDM yang ahli dalam penanganan kedaruratan bencana. 10. Mendata Kerusakan Pasca Bencana 11. Melakukan Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan

			<p>kerugian</p> <p>12. Melakukan perbaikan infrastruktur pasca bencana dengan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait di Pemerintah Provinsi Riau</p>
--	--	--	---

Untuk kebijakan yang menaungi kegiatan OPD yang bersifat rutin, maka mengacu pada misi ke 5 pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 seperti tercantum pada tabel 2.1.2.b berikut ;

**Tabel 2.1.2.b
RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

VISI Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD Riau Tahun 2019-2024: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia".			
MISI RPJMD Riau ke – 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Riau Tangguh dalam menghadapi bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumberdaya dan Sarana Prasarana pelayanan publik BPBD. 2. Membuat Kelembagaan Data dan Informasi dalam rangka penyampaian informasi bencana. 3. Memberikan Informasi dan Data terkait Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja BPBD melalui peningkatan SDM dan Sarana Prasarana BPBD. 2. Pembentukan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Melakukan pembaharuan teknologi informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh publik.

2. 2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (Penja) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Penja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja. Guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah maka dituangkanlah penugasan tersebut antara Gubernur Riau dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau dalam sebuah Perjanjian kinerja. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka tujuan Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberian Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, serta sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Dalam penyusunan Perjanjian kinerja BPBD Provinsi Riau terdapat perubahan pada sasaran dan Indikator Kinerjanya, sehingga berpengaruh pada penilaian atas keberhasilan atau kegagalan yang diperoleh untuk capaian akhir periode, perubahan sasaran dan indikator BPBD Provinsi Riau ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1
Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		SATUAN	TARGET
	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	Persen (%)	100%

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPBD Provinsi Riau pada tahun 2022 yang telah melaksanakan program penanggulangan Bencana yang didukung oleh APBD Perubahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.048.819.401,00,-. Yang terdiri dari program urusan dan program penanggulangan bencana, adapun dalam pencapaian kinerja didukung oleh Program penanggulangan

bencana yang terdiri dari 10 sub kegiatan sebagai dasar tolak ukur dalam capaian kinerja BPBD Provinsi Riau dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.137.827.906,00 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 119.447.000,00 dengan persentase capaian sebesar 76,29 %
2. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 469.996.000,00 dengan persentase capaian sebesar 86,65 %
3. Sub kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 176.518.624,00 dengan persentase capaian sebesar 79,36 %
4. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 211.162.428,00 dengan persentase capaian sebesar 87,71 %
5. Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 202.114.406,00 dengan persentase capaian sebesar 71,53 %
6. Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 580.804.850 ,00 dengan persentase capaian sebesar 92,80 %
7. Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 96.480.000,00 dengan persentase capaian sebesar 97,27 %

8. Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 75.013.598,00 dengan persentase capaian sebesar 98,60 %
9. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 111.154.000,00 dengan persentase capaian sebesar 93,80 %
10. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 95.107.000,00 dengan persentase capaian sebesar 77,83 %

Secara Umum dapat dilihat perjanjian kinerja BPBD Provinsi Riau dalam pelaksanaannya kemudian dipresentasikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.2
Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK perubahan (%)	Capaian target PK (%)	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100 %	86,18 %	Tw I	6,40
					Tw II	32,69
					Tw III	38,57
					Tw IV	8,52



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Untuk menentukan nilai capaian BPBD Provinsi Riau Berikut
Formulasi Perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan prioritas ketahanan daerah pada Tahun } n}{\text{Jumlah prioritas ketahanan daerah}} \times 100 \% = \frac{86,18}{86,18} \times 100 \% = 86,18 \%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPBD PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan



Gambar 3.1.1. Foto Kegiatan Rapat Evaluasi BPBD Provinsi Riau

sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana tindak lanjut dari PP Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Aparatur. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

cara membandingkan target dengan realisasi indicator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan prioritas ketahanan daerah Pada Tahun } n}{\text{Jumlah Prioritas Ketahanan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yang nantinya akan dipetakan kedalam sub kegiatan. Adapun tujuh prioritas ketahanan daerah yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan.
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik.
4. Penanganan tematik kawasan rawan Bencana.
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menggunakan skala pengukuran hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil pengukuran kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1.1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan sasaran strategis tersebut BPBD Provinsi Riau dalam menyajikan target dan Kinerja Untuk mengukur capaian kinerja kemudian dapat dilihat perbandingan target dan kinerja pada sasaran dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Kinerja BPBD Provinsi Riau Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	$6 = 5 \times 4 / 100$
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100	86.18	86.18

Sasaran strategis BPBD Provinsi Riau yakni dengan Meningkatkan Ketahanan Daerah di Provinsi Riau menunjukkan realisasi dan capaian sebesar 86,16 %. Perhitungan capaian ini diperoleh dari besaran realisasi dibagi dengan besaran Target sehingga diperoleh Capaian Kinerja dalam satuan persen. Sebagaimana dengan formulasi perhitungan capaian

kinerja yang telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan pada BPBD Provinsi Riau merupakan Prioritas dalam pelaksanaan ketahanan daerah.

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2022 serta capaian kinerja tahun 2022 dengan Tahun lalu

Secara umum uraian sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan uraian sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, namun terdapat perbedaan pada sasaran dan indikator kinerja nya sehingga untuk perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target Renstra BPBD Provinsi Riau.

Pada Revisi Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dalam rangka pemetaan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019. Perbandingan target dan realisasi kinerja BPBD Tahun 2022 dengan Renstra BPBD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target
Renstra BPBD Provinsi Riau.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Renstra 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100	100	86.18	86.18

Perbandingan Realisasi kinerja dengan dokumen RENSTRA menggambarkan apakah strategis dan capaiannya telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah dan apakah indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan di seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. BPBD Provinsi Riau telah berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, sesuai dengan capaian yang di peroleh sebesar 86.18% walaupun belum sepenuhnya mencapai target namun pelaksanaan kegiatan telah dicapai dengan baik, Diharapkan nantinya pada tahun berikutnya akan ada kenaikan terhadap realisasi dan capaian kinerja untuk tahun 2023.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional

Secara Umum Standar Nasional telah dilakukan mengacu pada standar nasional yang dilakukan BNPB yang mengarah kepada prioritas yang ada pada IRBI, yakni tujuh (7) prioritas yang ada pada IRBI tersebut yakni *(a) perkuatan kebijakan dan kelembagaan (b) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (c) pengembangan Sistem informasi, diklat dan logistic (d) penanganan tematik kawasan rawan bencana, (e) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana (f) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (g) pengembangan system pemulihan bencana* namun Badan penanggulangan Bencana belum melakukan perbandingan dengan Standar Nasional karena belum sampai 1(satu) tahun menggunakan standar tersebut sehingga pada uraian ini tidak/ belum dapat dibandingkan. Diharapkan nantinya pada tahun berikutnya bisa dilakukan perbandingan realisasi dengan Standar Nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.1.5
Sasaran dan indikator penyebab keberhasilan / kegagalan pada capaian target 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4x100%
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100	86.18	86.18

Dari tabel diatas dengan capaian kinerja sebesar 86.18% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% hal ini disebabkan ada beberapa kendala dalam mencapai target kinerja pada indikator tersebut seperti :

1. Ketersediaan Pagu yang terbatas sehingga tidak dapat memperluas gerakan dalam penanggulangan bencana seperti pada jaringan dan system keamanan yang masih standar.
2. Kurangnya kesadaran sumber daya yang manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana, sehingga relawan yang terdata belum sepenuhnya tersedia.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana operasional dan peralatan Early Warning System (EWS) bencana banjir di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas.

Adapun hal yang telah dilakukan BPBD Provinsi Riau untuk mengatasi permasalahan diatas yakni ;

1. Menggunakan jaringan dan sistim keamanan yang masih standar agar pemantauan yang dilakukan tetap terlaksana.
2. Melakukan pelatihan terkait penanggulangan bencana seperti pelatihan pada DESTANA yang tahun 2022 dilakukan pada Kabupaten Pelalawan Desa Kuala Terusan.
3. Melakukan pengawasan menggunakan peralatan Early Warning System (EWS) bencana banjir semaksimal mungkin dalam penanganan penanggulangan bencana agar tetap terlaksananya pengawasan dalam bencana banjir.

Berdasarkan pokok masalah yang ada, maka dilakukanlah langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Sebagai langkah kedepannya BPBD Provinsi Riau berupaya :

1. Melakukan pencegahan dini terhadap bencana .
2. Pengembangan budaya sadar bencana terhadap masyarakat yang letak geografis wilayahnya rentan terhadap bencana.
3. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana.

A. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2022 BPBD pada anggaran Murni mempunyai pagu sebesar Rp. 14.256.565.791,- dan pada perubahan anggaran tahun 2022 dengan masuknya Belanja Tak Terduga (BTT) dan pergeseran untuk penanggulangan bencana, maka pagu BPBD Provinsi Riau menjadi sebesar Rp. 16.048.819.401 , -.

Tabel 3.1.5.a
Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6=4-5
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	86.18	96.11	9.93

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Riau Berdasarkan tabel diatas Prosentase Penggunaan sumber daya keuangan BPBD Provinsi Riau dengan Anggaran tersebut diatas sudah terserap sebesar Rp. 15.424.126.221,77 atau (96.11%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 9.93 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja.

3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pencapaian Kinerja dibutuhkan kegiatan penunjang dalam mewujudkannya, terdapat 25 sub kegiatan dalam penunjang itu semua, hal ini berkaitan dengan capaian pada perjanjian kinerja BPBD provinsi Riau. adapun tahun 2022 BPBD Provinsi Riau mencapai Realisasi Perjanjian Kinerja sebesar 86.18 %, hal ini dapat dilihat pada Tabel Berikut ini :

Tabel 3.1.6

Kegiatan penunjang pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK 2022 (%)	Realisasi PK 2022 (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6= 5/4x100%
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100	86.18	86.18

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, BPBD Provinsi Riau pada Perubahan Anggaran tahun 2022 memiliki 2 (Dua) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Dari 25 Sub Kegiatan tersebut ada yang menunjang ataupun mengalami kegagalan dalam pencapaian kinerja. Untuk lebih jelasnya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.6.a

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	119.477.000	91.151.250	76,29 %
2.	Penyusunan Rencana Penanggulangan	469.996.000	407.241.676	86,65 %
3.	Pengelolaan Resiko Bencana	176.518.624	140.082.624	79,36 %
4.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	211.162.428	185.206.000	87,71 %
5.	Penanganan Pascabencana Provinsi	202.114.406	144.576.470	71,53 %
6.	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	580.804.850	539.010.868	92,80 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

7.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96.480.000	93.843.562,50	97,27 %
8.	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	75.013.598	73.963.598	98,60 %
9.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	111.154.000	104.265.500	93,80 %
10.	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	95.107.000	74.023.250	77,83 %
	JUMLAH	2.137.827.906	1.853.364.798,50	86.18 %

Dalam pemenuhan capaian kinerja Sebagai Penunjang Pencapaian Kinerja terhadap nilai perolehan SAKIP dan dalam menyusung



Gambar 3.1.3. Gubri Menyerahkan Penghargaan sebagai OPD dengan Inovasi Terbaik Kepada Kalaksa BPBD Provinsi Riau

"peningkatan, Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan " maka dibuatlah inovasi SIPAKAR dalam penanganan karhutla yang menjadi

salah satu program penunjang dalam pencapaian kinerja BPBD Provinsi Riau. dalam hal ini BPBD merupakan OPD yang mendapatkan Penghargaan atas pembuatan Inovasi tersebut.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Disamping sumber daya manusia, pelaksanaan kinerja instansi tentu saja tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Riau, pada tahun anggaran 2022, dengan anggaran yang dipergunakan pada anggaran Murni sebesar Rp. 14.256.565.791,- (86.18%) dari

pagu anggaran sebesar **Rp. 16.048.126.221,77,-**, secara ringkas komposisi realisasi penggunaan APBD Provinsi Riau tahun 2022 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Realisasi Kinerja dan Anggaran**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Perubahan Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100	86.18	86.18	16.048.819.401	15,424,126,221.77	96.11

Berdasarkan tabel diatas Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran strategis BPBD Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar Rp.15.424.126.221,77,- atau 96.11% dari total pagu sebesar Rp. 16.048.819.401,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9.93 % dari pagu anggaran yang ada.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau termasuk dalam urusan pendukung pada RPJMD Provinsi Riau, dengan tugas pokok dan fungsi utama melaksanakan penanggulangan bencana dari mulai Pra Bencana, Darurat Bencana hingga Pasca Bencana di Provinsi Riau, tentu saja memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya manusia dan modal yang memadai dan handal. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk mewujudkan insan peduli yang profesional dan tangguh terhadap bencana, respon cepat dan didukung dengan sarana prasarana yang berkualitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan dan menjadi alat kontrol dan pendukung untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Provinsi Riau di tahun 2022 telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut didasari oleh pencapaian terhadap semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik**. Pada tahun 2022 hanya terdapat beberapa *hotspot* dan *firespot* di lapangan di Kabupaten/Kota dan dapat segera ditanggulangi sebelum menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas lagi. Hal ini berkat kesigapan satgas gabungan Karhutla

Kab/Kota dan Provinsi serta dukungan dari berbagai pihak dalam mencegah bencana Karhutla di wilayah masing-masing sebelum membesar area kebakarannya. Selain itu, beberapa bencana lainnya seperti banjir yang terjadi di beberapa daerah dapat diatasi dengan baik.

Walaupun adanya beberapa kegiatan yang penyerapannya rendah, akibat adanya pandemi Covid-19, akan tetapi dukungan dari APBN lewat BNPB dapat membantu tercapainya kinerja BPBD Provinsi Riau untuk menjaga Provinsi Riau tidak berlarut-larut dalam menghadapi Karhutla Tahun 2022.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan dan solusi yang dapat menghambat kinerja BPBD Provinsi Riau diantaranya :

1. Masih rendah nya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana.
2. Masih minimnya jumlah personil BPBD yang belum berpengalaman dibidangnya.
3. Kurangnya perhatian terhadap meningkatkan kualitas dalam layanan jaringan dan sistem keamanan berbasis teknologi sehingga perluasan dan peningkatan layanan menjadi tidak maksimal.

4.2. Langkah Strategis Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Berdasarkan hasil analisa di atas, diperlukan upaya dan strategi yang tepat guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja BPBD Provinsi Riau sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

1. Mewujudkan peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana.
2. Mewujudkan standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mengupdate kembali kualitas jaringan dengan pembaharuan peningkatan perangkat system jaringan penanggulangan Bencana yang lebih baik dan penambahan peralatan lain yang mendukung pemutahiran serta anggaran dalam pemeliharaan peralatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Provinsi Riau Tahun 2022 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU



M. EDY AFRIZAL, SE, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19730421 199203 1 002



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

LAMPIRAN





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 17 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,




SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. EDY AFRIZAL, SE., MH**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **Drs. H. SYAMSUAR, M.Si**
Jabatan : Gubernur Riau

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR RIAU,

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU,**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketahanan Daerah di Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan prioritas ketahanan daerah di Provinsi Riau	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.485.292.458,00
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.640.000,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.576.705,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.310.122,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.641.897.210,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.275.000,00
7.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	119.477.000,00
8.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.059.791.458,00
9.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	677.284.850,00
10.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	281.274.598,00
	Jumlah	16.048.819.401,00

Pekanbaru, November 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR RIAU,



Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU,**



M. EDY AFRIZAL, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730421 199203 1 002



Pragam Penghargaan

Terbaik 1

Perangkat Daerah Provinsi Riau yang memiliki nilai kematangan tertinggi pada pelaporan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022

Diberikan Kepada :

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI RIAU**

Dengan nama Inovasi :

**Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Riau
(SIPAKAR)**

Pekbaru, 30 Desember 2022
Gubernur Riau


SYAMSUAR